

KESIAPAN DATA PEMILU TERBUKA

SEPTEMBER, 13 2021



Kesiapan Data Pemilu Terbuka Temuan dan Analisis

Di Indonesia, terdapat beberapa sumber data pemilu yang telah dikelola oleh KPU, yaitu Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Calon (SILON), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), dan Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Pemilu (SIREKAP).

No.	Key Election Dataset	Rating
1	Legal Frameworks	Mostly Open
2	Election Management Body and Administration	Mostly Open
3	Election Management Body Processes	Mostly Open
4	Electoral Boundaries	Mostly Open
5	Election Security	Not Open
6	Political Party Registration	Partially Open
7	Ballot Qualification	Mostly Open
8	Election Campaign	Mostly Open
9	Campaign Finance	Partially Open
10	Voter Registration	Partially Open
11	Voter Lists	Partially Open
12	Voter Education	Mostly Open
13	Polling Stations	Partially Open
14	Election Results	Not Open
15	Electoral Complaints and Disputes	Partially Open



THE CIVIC TECH ECOSYSTEM AND OPEN ELECTION DATA READINESS TO IMPROVE ELECTION INTEGRITY IN INDONESIA

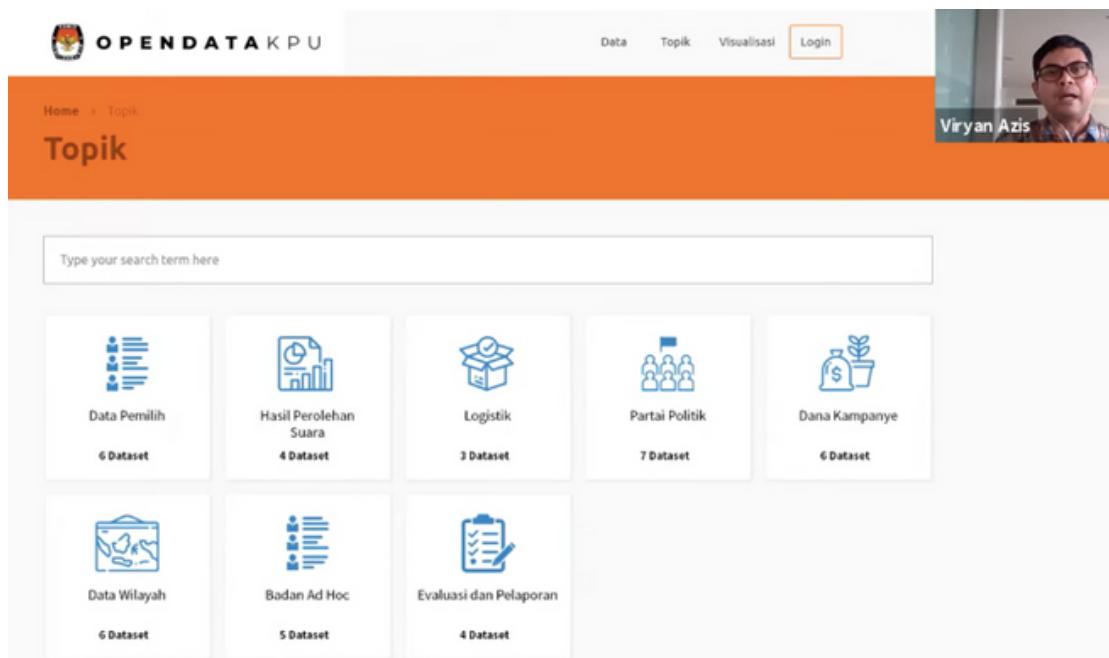
Pada hari Selasa, 7 September 2021, The INDONESIAN FORUM (TIF) Seri 78 diadakan dengan mengangkat tema "Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka dalam Rangka Meningkatkan Integritas Pemilu di Indonesia". Viryan Azis, Komisioner KPU RI sebagai pembicara pertama menjelaskan tentang bagaimana KPU menjalankan data terbuka untuk integrasi pemilu di Indonesia. Dijelaskannya bahwa dari 274.9 juta penduduk Indonesia, terdapat 345 juta pemilik akses terhadap mobile phone dan 98% dari pengguna handphone memiliki smart phone. Terlebih lagi, tercatat adanya 125% pertumbuhan pengguna internet. Dari tahun 2020 ke tahun 2021, ada kurang lebih 27 juta pengguna baru dan ini akan terus meningkat. Data ini menunjukkan digitalisasi pemilu merupakan

On Tuesday, 7th September 2021, The Indonesian Forum (TIF) Series 78 was held under the theme "Civic Tech Ecosystem and Open Election Data Readiness in the Context of Improving Election Integrity in Indonesia". Viryan Azis, Commissioner of the Indonesian General Elections Commission (Komisi Pemilu Umum - hereinafter will be referred to as KPU), as the first speaker explained the status quo on open data for election integration in Indonesia. He explained, of the 274.9 million Indonesia's population, there are 345 million people have access to mobile phones and 98% of them own a smartphone. Moreover, there is a 125% growth in internet users. Furthermore, from 2020 to 2021, approximately 27 million new users were recorded, and this number will continue to increase. This data shows that the digitalization

kebutuhan. Data tersebut juga menunjukkan kesiapan masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam pemilu digital. Peta jalan transparansi informasi KPU dilakukan dengan tiga tahapan, pertama, penerapan Peraturan Hukum tentang Keterbukaan Informasi Publik, Prinsip dan Standar menjadi landasan. Kedua, digitalisasi pemilu itu sendiri yang mana data is the new oil namun harus dikelola dengan baik untuk memberi manfaat dan dampak yang besar. Dan yang terakhir, prinsip data pemilu terbuka.

of elections is a necessity. The data also shows the readiness of the Indonesian people to be involved in digital elections. Along the way, the KPU information transparency roadmap is carried out in three stages. First, the application of the Law on Public Information Disclosure, Principles and Standards as the basis. Second, the digitisation of the election itself, in which optimal data utilisation must be done equally with proper data management to provide greater benefits and impact. And lastly, the principle of open election data.

Figure 1. Screenshot of KPU's Open Data Website



Source: Viryan Azis's Presentation, Commissioner of KPU RI 2021

Dalam digitalisasi pemilu, terdapat 5 kedaulatan digital dan perlu di kontrol agar tidak ada vandalisme data. Digitalisasi pemilu bagi KPU juga menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kepercayaan publik yang dapat meningkatkan akuntabilitas, aksesibilitas, kecepatan, kemurnian, kemudahan, transparansi, dan partisipasi. Pengelolaan data pemilu terbuka diharapkan dapat menjaga kemurnian suara. Secara ringkas, data pemilu terbuka bisa digunakan dan menjadi kata kunci untuk meningkatkan partisipasi

In the digitalisation of elections, there are 5 digital sovereignty that needs to be controlled to avoid data vandalism. For KPU, the digitisation of elections is also a necessity to increase public trust that can increase accountability, accessibility, speed, purity, convenience, transparency, and participation. The Open Election Data management is expected to maintain the purity of the vote. In summary, Open Election Data can be used and become a keyword to increase the participation of all parties, including the government, organisers,

semua pihak baik pemerintah, penyelenggara, OMS, pemilih, peserta, dan media. Prinsip pengembangan digitalisasi pemilu juga perlu memperhatikan lima hal, yaitu (1) Peningkatan derajat Pemilu demokratis, (2) Semua tahapan Pemilu kecuali penghitungan pemungutan suara, (3) Kemudahan para pihak, (4) Jaminan keamanan digital, dan (5) Data Pemilu terbuka.

KPU juga sedang merampungkan versi ketiga dari Data Pemilu Terbuka yang dapat diakses di opendata.kpu.go.id. Nantinya, data seluruh tahapan pemilu akan diupload berdasarkan topik yang ada dalam format CSV dan/atau Excel. Sejak tahun 2018 KPU menyadari NIK merupakan elemen data yang perlu dilindungi maka pengaturannya ada di prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi yang baik yang diharapkan nantinya dapat masuk ke dalam UU Perlindungan Data Pribadi. KPU juga akan memberikan akses API pada Open Data KPU sebagai salah satu keterbukaan data yang dapat langsung dioleh oleh publik.

Isu krusial kebutuhan digitalisasi pemilu adalah integrasi data kepemiluan. Integrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya belum dapat dilakukan di tahun 2019. Namun, untuk Pemilu 2024, KPU berambisi untuk mengintegrasikan data seperti pada Figure 2.

Terkait progress open data yang disampaikan KPU, The Indonesian Institute mengadakan penelitian yang hasilnya disampaikan oleh pembicara kedua, Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute. Beliau memaparkan temuan mereka dalam sisi kerangka hukum dan implementasi untuk meningkatkan integritas Pemilu. Civic tech pada intinya merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dalam meningkatkan mutu layanan publik. Namun

CSOs, voters, participants, and the media. The principle of developing election digitisation also needs to pay attention to five aspects, namely (1) Increase the degree of democratic elections, (2) All stages of the election except vote counting, (3) Ease of parties, (4) Digital security guarantees, and (5) Open Election Data.

The KPU is also finalising the third version of the Open Election Data which is accessible through the website opendata.kpu.go.id. Later, all election stages data will be uploaded based on the topics in CSV or Excel format. Since 2018, the KPU has realised the sensitivity and confidentiality of the Personal Identity Number (NIK) and understood that this regulation should be in the principles of good personal data management which are expected to be included in the Personal Data Protection Law. Furthermore, KPU will also provide an Application Programming Interface (API) access to KPU's Open Data as one of the data disclosures that can be directly accessed by the public.

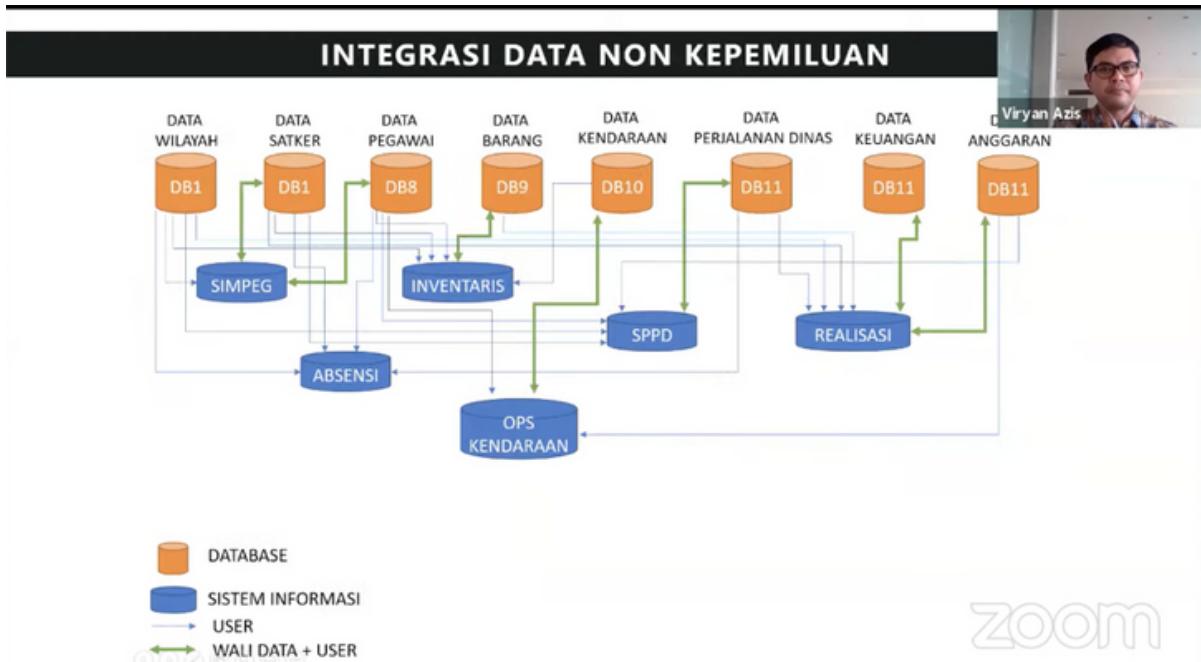
The crucial issue regarding the need for digitizing elections is the integration of electoral data. Integration between one stage and another cannot be carried out in 2019. However, for the 2024 General Election, they aim to integrate data as shown in Figure 2.

Regarding the progress of Open Data submitted by the KPU, The Indonesian Institute conducted a study whose results were presented by the second speaker, Adinda Tenriangke Muchtar, Executive Director of The Indonesian Institute. She presented their findings in terms of the legal framework and implementation to improve the integrity of the election. Civic tech is essentially an information and communication technology that enables greater public participation in improving the quality of

dalam praktiknya, terdapat tantangan bagi Civic tech antara lain hoaks, ancaman UU ITE, ketimpangan teknologi, serta kerahasiaan dan keamanan data.

public services. However, in practice, there are challenges in Civic tech, including hoaxes, threats to the ITE Law, technological inequality, and data confidentiality and security.

Figure 2. Electoral Data Integration Map



Source: Viryan Azis's Presentation, Commissioner of KPU RI 2021

Dalam elemen keberhasilan civic tech, terdapat 8 elemen yang salah satunya adalah kepemimpinan dan komitmen politik. Terkait segi komitmen kepemimpinan dan komitmen politik, Indonesia merupakan salah satu inisiator Open Government Partnership (OGP) dan pembentukan Open Government Indonesia (OGI). Namun, keterbatasan anggaran, ketidaksamaan visi dan komitmen dari stakeholder terkait data pemilu terbuka, penolakan dari kandidat pemilu untuk membuka profil mereka, dan interpretasi beragam mengenai peraturan pemilu menjadi tantangan komitmen politik mengenai data pemilu terbuka. Terdapat juga tantangan tugas dan fungsi serta kapasitas institusional pemerintah yang belum dapat mengintegrasikan data yang dimiliki oleh KPU melalui "Satu Pintu". Terkait dengan keterlibatan dan kapasitas kelompok masyarakat,

In the elements of civic tech's success, there are 8 elements, one of which is leadership and political commitment. In terms of leadership commitment and political commitment, Indonesia is one of the initiators of the Open Government Partnership (OGP) that established Open Government Indonesia (OGI). However, budget constraints, unequal vision and commitment from stakeholders regarding open election data, refusal of election candidates to disclose their profiles, and varied interpretations of election regulations pose challenges to political commitment to open election data. There are also challenges in the duties and functions as well as the institutional capacity of the government which has not been able to integrate the data held by the KPU through the "One Door" system. Regarding the involvement and capacity of community groups,

KPU sudah mendapat nilai hijau yang berarti cukup baik.

Kerangka hukum sebagai landasan untuk membuka informasi publik sudah tersedia. Namun, diperlukan ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis yang menyebutkan prinsip keterbukaan data pemilu. Regulasi lainnya juga diperlukan untuk memastikan privasi dan perlindungan data serta melindungi pemilih dari risiko kampanye politik digital.

Untuk mendukung ekosistem civic tech di Indonesia, The Indonesian Institute memberikan rekomendasi untuk KPU untuk antara lain (1) Menerapkan peraturan mengenai Satu Data Indonesia untuk mendukung keterbukaan data dan mendukung civic tech, (2) Menyediakan pusat informasi satu pintu yang dilegitimasi oleh regulasi untuk mendorong penyebaran informasi yang berorientasi pemilih, (3) Mendorong peningkatan kapasitas SDM insitutusi penyelenggara pemilu di bidang manajemen dan permintaan data pemilu, (4) Menyediakan data yang aksesibel bagi pengguna serta pengelolaan data rutin yang tersistematis.

KPU has received a green score which means it is quite good.

The legal framework as the basis for disclosing public information is already available. However, more detailed and more technical provisions that state the principle of open election data are needed. Other regulations are also needed to ensure privacy and data protection and protect voters from the risks of digital political campaigns.

To support the civic tech ecosystem in Indonesia, The Indonesian Institute provides recommendations for the KPU to include, including, (1) Implementing the One Data Indonesia regulation to support data disclosure and supporting civic tech, (2) Providing a one-stop information centre legitimised by regulations to encourage dissemination of voter-oriented information, (3) Encouraging capacity building of human resources of election management institutions in the field of management and requesting election data, (4) Providing accessible data for users as well as systematic routine data management.

Figure 3. Conclusion of The Indonesian Institute Study Findings related to Open Election Data

Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka

Kesimpulan



Elemen Ekosistem Civic Tech

Rating

Kepemimpinan dan Komitmen Politik	Hijau
Kerangka Hukum dan Kebijakan Utama	Kuning
Tugas dan Fungsi serta Kapasitas Institusional Pemerintah	Kuning
Prosedur dan Kebijakan Pengelolaan dan Ketersediaan Data	Kuning
Keterlibatan dan Kapasitas Kelompok Masyarakat	Hijau
Dukungan Anggaran	Hijau
Permintaan Data	Kuning
Infrastruktur Teknologi dan Keterampilan SDM	Merah

Kesiapan Data Pemilu Terbuka

- Berdasarkan penilaian terhadap keterbukaan data pemilu, terdapat 7 dataset yang dinilai sudah hampir terbuka yaitu *legal frameworks, election management body and administration, election management body process, electoral boundaries, ballot qualification, election campaign, and voter education*
- Terdapat 6 dataset yang dinilai sebagian terbuka: *political party registration, campaign finance, voter registration, voter list, polling station, and electoral complaint and disputes*
- Terdapat dua dataset yang dinilai tidak terbuka, yaitu *election security and election results*
- Untuk dataset *e-voting & counting* tidak tersedia karena Indonesia tidak menggunakan *sistem e-voting & counting*.

Source: Adinda Tenriangke Muchtar's Presentation 2021

Pembicara ketiga merupakan mitra OGI yang bersama-sama mendorong Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI komitmen nomor 13 terkait Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu. Ko-kreasi implementasi komitmen Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia mengenai pemilu diperlukan dalam pengembangan ekosistem keterbukaan data pemilu. RAN OGI ini sudah dimulai sejak tahun 2018, ketika Indonesia menjadi success story dunia terkait praktik baik Open Government. Maharddhika, Peneliti Perludem, memberikan paparan terkait arah keterbukaan data pemilu dengan pendekatan penguatan ekosistem. Pendekatan ini relevan karena berdasarkan premis bahwa pencapaian integritas pemilu dipengaruhi oleh banyak hal dan saling berkaitan. Pendekatan dan penggunaan teknologi data juga menghadirkan disruptsi yang dapat menginterupsi proses atau kegiatan yang berlangsung.

Arthur Glenn Maail, Open Data Labs Jakarta memberikan paparan terkait implementasi data pemilu terbuka dan hubungannya dengan civic tech untuk mewujudkan open data pemilu yang berkelanjutan. Hadirnya revolusi teknologi informasi sejak 20 tahun belakangan ini, mentransformasi konsep pelibatan masyarakat, yang mana teknologi dapat meningkatkan pelibatan masyarakat hingga tingkatan partisipasi tertinggi. Untuk ekosistem data, perkembangan data science yang semakin pesat atau Big Data serta perubahan paradigma terkait tata kelola data di sektor publik menjadikan data sebagai elemen penting dalam pelibatan masyarakat dalam pemerintahan. Data terbuka ini merupakan data yang dapat digunakan oleh siapa saja dan tidak ada restriction yang diberikan produsen data itu sendiri. Gerakan open data sendiri sudah muncul sejak 2009. Di Indonesia, Open Data muncul sekitar tahun 2012

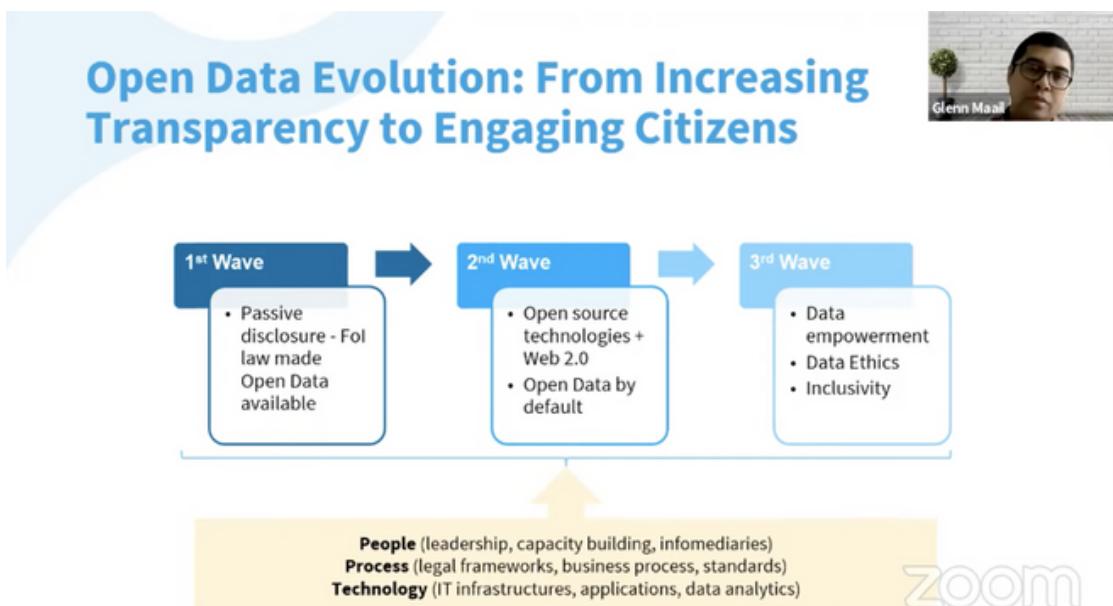
The third speaker is Perludem as OGI partner that has jointly pushed for the 2020-2022 OGI National Action Plan (NAP) specifically commitment number 13 related to Strengthening the Ecosystem of Open Election Data to Increase Accountability of Election Administration. The co-creation during the implementation of the OGI NAP commitment regarding elections are needed in the development of an open election data ecosystem. The 2018 Open Government Indonesia NAP became the world's success story regarding the good practice of Open Government. Maharddhika, a researcher of Perludem, explained the direction of Open Data Election using an ecosystem strengthening approach. This approach is relevant because it is based on the premise that the achievement of electoral integrity is influenced by many things and is interrelated. The approach and use of data technology also present disruptions that can interrupt ongoing processes or activities.

Arthur Glenn Maail from Open Data Labs Jakarta explained the Open Data Election implementation and its relationship with sustainable civic tech. The presence of the information technology revolution for the last 20 years has transformed the concept of community involvement, in which technology can increase community involvement to the highest level of participation. As for the data ecosystem, the increasingly rapid development of data science or Big Data, as well as paradigm changes related to data governance in the public sector, has transformed data into an important element in ensuring community involvement in the government. The open data refers to data that can be used by anyone and with no restrictions. The open data movement itself has emerged since 2009. In Indonesia, Open Data emerged around 2012 or 2013 when Indonesia already had a Public Information Disclosure Act and was actively involved in Open Government. Regarding the

atau 2013 saat Indonesia sudah mempunyai UU Keterbukaan Informasi Publik dan terlibat aktif dalam Open Government. Mengenai perkembangan Open Data di Indonesia, Indonesia mendapatkan nilai 37 dari 100 dimana penilaian dilakukan dengan tiga kategori yaitu kesiapan, implementasi, dan dampak. Sejak tahun 2009, gerakan Open Data sudah mengalami tiga kali evolusi (lihat gambar 4).

development of Open Data in Indonesia, Indonesia received a score of 37 out of 100 in which the assessment was carried out in three categories, namely readiness, implementation, and impact. Since 2009, the Open Data movement has undergone three evolutions (see Figure 4).

Figure 4. Evolution of Open Data



Source: Arthur Glenn Maail's Presentation 2021

Open Data Lab mendorong CSO atau (Civil Society Organisation) untuk menjadi sumber data data terbuka, bukan hanya pemerintah pusat. Kedepannya, implementasi keterbukaan data di tingkat pemerintah daerah juga perlu didorong karena saat ini hanya di DKI Jakarta yang fokus mengembangkan keterbukaan data daerahnya. Pengembangan kapasitas dan data empowerment dapat dilakukan dengan pendidikan dan penanaman kesadaran tanggung jawab dalam menggunakan data yang baik. Dalam hal ini, individu juga didorong dan perlu ada kerangka hukum terkait perlindungan data pribadi.

Seperti temuan studi yang telah disampaikan oleh Direktur Eksekutif The Indonesian Institute,

The Open Data Lab encourages CSOs or (Civil Society Organizations) to open their source of data; not just the central government needs to do that. In the future, the implementation of data disclosure at the local government level also needs to be encouraged as currently only DKI Jakarta is focused on developing open regional data. Capacity building and data empowerment can be done through education and instilling an awareness of responsibility in using good data. In this case, individuals are also encouraged, and there needs to be a legal framework regarding the protection of personal data.

As the findings of the study presented by the Executive Director of The Indonesian Institute,

komitmen politik perlu juga didorong untuk meningkatkan integritas pemilu. Pembicara terakhir Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan wawasan terkait sistem, aktor, kultur, teknologi, dan tantangan ekosistem pemilu terbuka. Dijelaskan oleh beliau bahwa Komisi 2 DPR telah mengusahakan Kitab RUU Pemilu yang menyatukan RUU Pileg Pilpres dengan RUU Pilkada namun gagal. UU No. 7 tahun 2017 dan UU No. 10 tahun 2016 yang tadinya terpisah akan digabungkan, yang mana Kitab UU Pemilu akan dibagi menjadi dua; Buku UU Pemilihan Legislatif dan presiden dan Buku UU Pilkada. Pada tahun 2020 akhir, proposal ini dibawa ke Badan Legislatif, namun di tahun 2021 dinyatakan oleh Pemerintah bahwa UU ini tidak memerlukan revisi. Padahal dalam proses integrasi data antara KPU dengan Kemendagri, KPU bekerja berdasarkan UU yang mengatur KPU untuk melakukan pembersihan data. Terlebih lagi, KPU sering dituduh lepas tangan, padahal KPU hanya berbasis pada UU yang ada dan sangat dibatasi ruang lingkupnya. Seharusnya, KPU dapat diberikan kebebasan terkait teknis, sedangkan yang strategis dapat diikat di UU.

Dalam kultur ekosistem ini, yakni rumah demokrasi dan pemilu di Indonesia, KPU sudah melakukan tugasnya. Namun, tugas Kemendagri masih perlu dikuatkan untuk menunjukkan urgensi pembuatan kajian pemanfaatan infrastruktur Kemendagri. Kemendagri memiliki infrastruktur yang luas hingga level desa, sehingga hal ini perlu dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia agar kultur dan ekosistem pemilu ini tidak mati. Selainnya, Bapak Mardani juga menyatakan perlunya political will Presiden Jokowi karena beliau perlu memberikan perhatian kepada sistem demokrasi yang sehat dan kuat.

political commitment should also be encouraged to improve the integrity of elections. The last speaker, Mardani Ali Sera, Member of Commission II of the Indonesian House of Representatives, conveyed insights regarding the system, actors, culture, technology, and challenges of the open election ecosystem. He explained that Commission 2 of the House of Representatives had been working on the Election Bill which aims to unify the Presidential Election Bill with the Regional Head Election Bill but failed. Initially, The Constitution no. 7 of 2017 and Law no. 10 of 2016 which were previously separated will be merged, in which the Election Law will be divided into two; Book of Legislative and Presidential Election Law and Election Law Book. In late 2020, this proposal was brought to the Legislative Body, but in 2021 it was stated by the Government that this Law does not require revision. Whereas in the data integration process between the KPU and the Ministry of Home Affairs, the KPU works based on the law that regulates the KPU to perform data cleaning. Moreover, KPU is often accused of being irresponsible, even though KPU is only based on existing laws and is very limited in scope. Supposedly, KPU can be given freedom regarding technical matters, while strategic ones can be bound by law.

In this ecosystem culture, namely the house of democracy and elections in Indonesia, KPU has done its job. However, the task of the Ministry of Home Affairs still needs to be strengthened to show the urgency by making a study on the use of the Ministry of Home Affairs' infrastructure. The Ministry of Home Affairs has extensive infrastructure up to the village level, so this needs to be utilized to improve the quality of elections in Indonesia so that the culture and ecosystem of this election do not die. Moreover, Mr Mardani also stated the need for President Jokowi's political will to ensure a healthy and strong democratic system.